

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

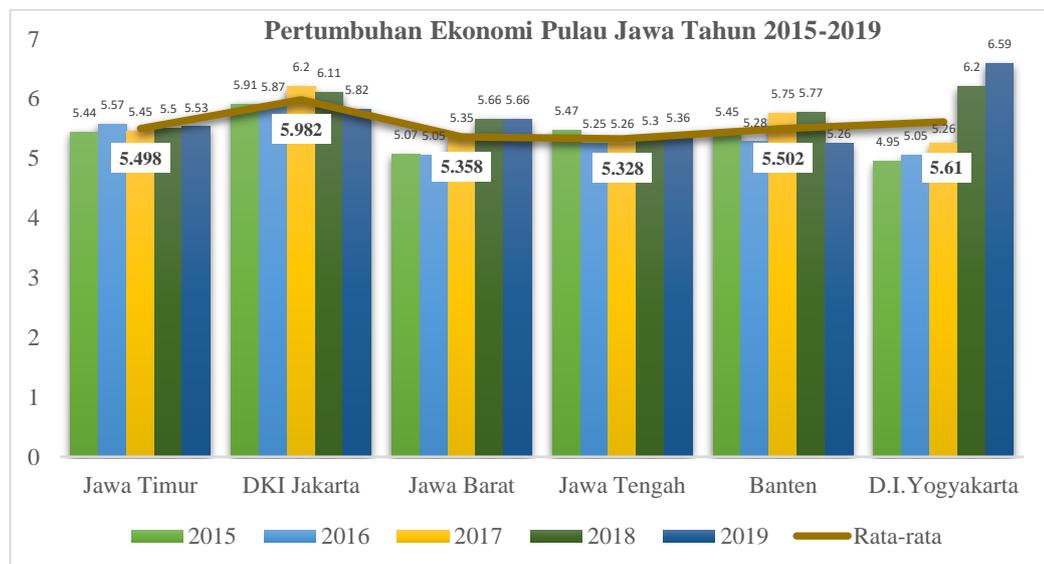
### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka waktu yang panjang, dan sudah biasa ditemukan di semua negara, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, menyadari pentingnya pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa (Dewi and Cahyono, 2016), pertumbuhan ekonomi mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, yang tujuan utamanya adalah untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (Latuconsina, 2017). Pembukaan UUD 1945 alinea 4 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut berkorelasi kuat dengan unsur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang biasa menjadi suatu masalah pada setiap negara merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sendiri itu ialah proses perubahan keadaan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan mengarah pada kondisi yang jauh lebih baik sepanjang periode tertentu (Rakhmawati, 2016). Perekonomian dapat dikatakan mengalami suatu pertumbuhan dalam perkembangannya, jika tingkat kegiatan ekonomi meningkat daripada yang sudah dicapai pada periode sebelumnya (Lumbantoruan & Hidayat, 2013 dalam Salamah, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dikenal pula sebagai suatu proses kenaikan output dari waktu ke waktu menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu negara (Hadi Sasana, 2016 dalam Septiana, 2020).

Indikator keberhasilan pembangunan tercermin dari tingkat perekonomian suatu daerah. Tingkat perekonomian yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat pembangunan yang berhasil, dan begitu juga sebaliknya. Tingkat perekonomian suatu wilayah dapat dikalkulasikan dengan menghitung total barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu, biasa dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan (Dewi, Yusuf and Iyan, 2016).

**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Tahun 2015-2019**

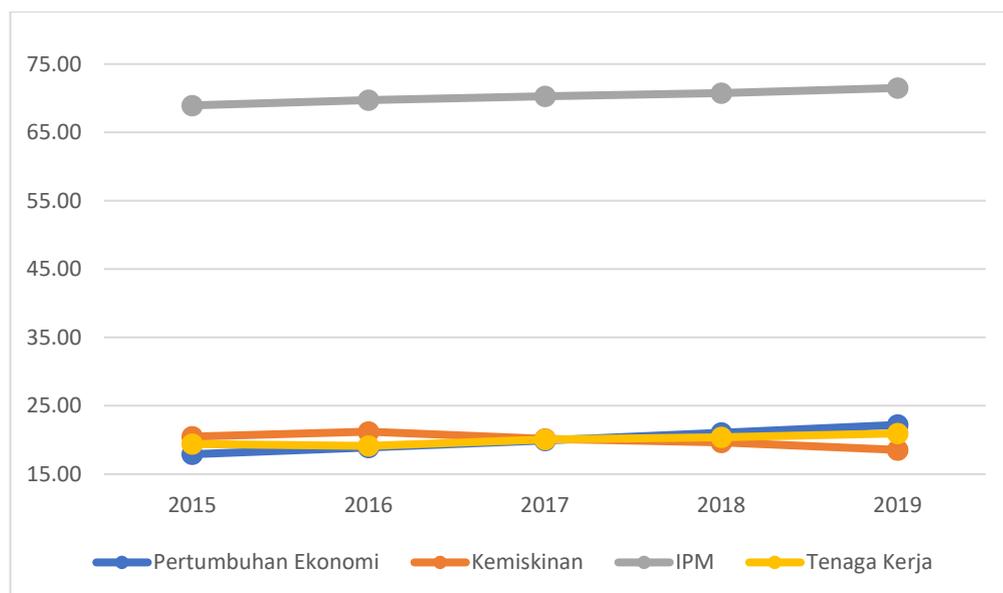


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur diilustrasikan pada Gambar 1.1. terlihat bahwa Jawa Timur mengalami tren kenaikan pertumbuhan ekonomi selama delapan tahun terakhir. Tren progresif ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah provinsi dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya

berbanding lurus dengan target yang telah di rencanakan. Dimana pada tahun 2015 laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur adalah 5,44% dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 sebesar 5,53%. Angka ini termasuk tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Banten (BPS,2022). Selain itu kemiskinan diduga dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan kemiskinan menghambat seseorang untuk dapat berperan dalam kegiatan perekonomian yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ningrum, Khairunnisa and Huda, 2020).

**Gambar 1. 2 Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur terus mengalami tren kenaikan dari tahun 2015-2019. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mencapai angka 5,44% pada tahun 2015. Persentase ini mengalami kenaikan yang berkesinambungan sampai menyentuh angka 5,53% pada tahun 2019. Tren progresif ini terjadi karena Provinsi Jawa Timur

menggunakan unsur konsumsi rumah tangga sebagai unsur prioritas yang proporsinya mencapai 59%. Oleh karena itu, unsur konsumsi rumah tangga merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan terkait pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan tentu tidak luput dari topik kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan tahap dimana seseorang berada dalam tingkat ekonomi rendah, tidak bisa mencukupi kebutuhan materi dan non materi atas dirinya berdasarkan standar hidup masyarakat di sekitarnya. Rendahnya standar kehidupan tentu berkorelasi dengan tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan gaya hidup seseorang. Individu yang termasuk kategori miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang konkrit dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka merasakan dan mengalami sendiri pengalaman hidup dalam garis kemiskinan (Paramita and Purbadharmaja,2013).

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan pengurangan secara signifikan. Berdasarkan data pada tahun 2015, total penduduk kategori miskin di Provinsi Jawa Timur mencapai angka 4.476 jiwa dari 38.847.561 jiwa penduduk Provinsi Jawa Timur. Angka tersebut terus menurun sampai tahun 2019 diketahui bahwa total penduduk kategori miskin di Provinsi Jawa Timur mencapai angka 4.056 jiwa dari 39.698.631 jiwa penduduk Provinsi Jawa Timur, dengan kata lain tingkat kemiskinan yang mencapai angka 10,3%.

Kemajuan ini mencerminkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur turut andil secara aktif dalam pengurangan angka kemiskinan dengan cara tidak hanya mengandalkan bantuan sosial saja, namun melakukan pemberdayaan serta edukasi terhadap masyarakat. Selain itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang

terus berkurang, diakibatkan oleh akselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tentu berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang meningkat pula.

Sebagai pelaksana pembangunan, pemerintah tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas selaku modal dasar pembangunan. Dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya, adapun kualitas sumber daya manusia dapat di ukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Dewi, Yusuf and Iyan,2016). Pembangunan manusia salah satu indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan sumber daya manusia suatu wilayah. Pada tahun 1990, IPM pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Badan Pusat Statistik (BPS) telah memperbaharui aturan terkait indikator dalam IPM yang dinilai sudah tidak relevan untuk digunakan. Indikator tersebut diantaranya yaitu perubahan penggunaan angka melek huruf yang diganti dengan angka harapan lama sekolah, perubahan penggunaan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang diganti menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (Ningrum, Khairunnisa and Huda, 2020).

Sepanjang tahun 2015-2019, IPM Provinsi Jawa Timur mengalami perbaikan yang signifikan. IPM Provinsi Jawa Timur dimulai dari angka 68,95% pada tahun 2015, meningkat menjadi 70,77% pada tahun 2018 dan mencapai angka 71,5% pada tahun 2019. IPM Provinsi Jawa Timur termasuk pada kategori sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ) apabila ditinjau dari klasifikasi yang disusun oleh UNDP. Angka

tersebut mengandung interpretasi bahwa aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup di Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan cukup layak.

Terlepas dari isu kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia, aspek ketenagakerjaan merupakan aspek yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tenaga kerja berperan sebagai salah satu faktor produksi yang berkontribusi terhadap tinggi rendahnya output yang dihasilkan masyarakat. Sementara itu, hubungan antara jumlah tenaga kerja dan output seringkali dianggap memiliki korelasi positif. Dengan kata lain peningkatan jumlah tenaga kerja akan selalu diikuti dengan peningkatan output, dan begitu juga sebaliknya. Pada nyatanya, *statement* tersebut tidak sepenuhnya tepat. Hal ini dikarenakan yang mempengaruhi kinerja dari tenaga kerja adalah kualitas yang dimiliki. Walaupun jumlah tenaga kerja konstan, perubahan kualitas tenaga kerja dan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan (Irawan dan Suparmoko, 2008:119 dalam Rakhmawati,2016).

Jumlah Angkatan kerja Provinsi Jawa Timur mengalami tren yang fluktuatif. Meskipun demikian, fluktuasi tersebut tidak berada pada *range* yang jauh, yaitu sebanyak 20.274.681 jiwa pada tahun 2015, kemudian berkurang menjadi 19.953.846 jiwa pada tahun 2016, dan meningkat kembali menjadi 21.867.742 jiwa kemudian pada tahun 2017. Penambahan tenaga kerja yang terjadi tentu harus diikuti dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja sebagai akomodasinya. Oleh karena itu, hal ini harus ditindaklanjuti dengan perluasan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu mencerminkan masyarakat yang hidup dengan kemakmuran yang tinggi pula (Lincoln,2010). Undang-Undang No.13

Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang pengertian tenaga kerja. Peraturan ini menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling krusial daripada faktor produksi lainnya. Hal ini dikarenakan faktor produksi seperti bahan mentah, tanah, air, tidak akan mampu bergerak sendiri untuk menghasilkan output. Unsur-unsur tersebut membutuhkan tenaga kerja sebagai penggerak (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016).

Upaya dalam mengurangi angka kemiskinan sering kali mengalami kendala terkait faktor pengelolaan dan sasaran yang tidak tepat. Terjadi ketimpangan ekonomi yang tinggi antara desa dan kota. Dimana kemiskinan di desa cukup tinggi, namun GINI ratio-nya rendah. Sebaliknya di perkotaan kemiskinan rendah, namun ketimpangan tinggi. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah sering kali diakibatkan adanya pembangunan yang tidak merata, terjadinya aglomerasi di titik-titik tertentu, dan kualitas pengelolaan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan beberapa daerah mengalami pembangunan yang pesat, sementara daerah lain mengalami keterbelakangan pembangunan. Hal ini juga disebabkan kurangnya sumber daya dan kurangnya potensi dalam mengelola sumber daya tersebut karena sebagian besar tenaga kerja di Jawa Timur tidak memiliki keahlian atau unskill labour. Tidak hanya itu saja, rata-rata lama sekolah di Jawa Timur yakni 7.34 tahun. Artinya masih banyak masyarakat Jawa Timur Drop Out saat kelas dua MTs/SMP.

Melihat fenomena di atas, pertumbuhan ekonomi merupakan aspek krusial dalam rangka akselerasi kesejahteraan masyarakat, tingginya pertumbuhan

ekonomi Provinsi Jawa Timur, kesejahteraan masyarakat yang dilihat melalui besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan tinggi dan banyaknya jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur belum dapat membuktikan bahwa masyarakatnya telah sejahtera dan mendapat fasilitas pembangunan yang setara di Provinsi Jawa Timur dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi nyatanya menjadi faktor utama yang menentukan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek pendapatan daerah dan anggaran desentralisasi, namun terdapat pula isu makro yaitu Indeks Pembangunan Manusia, ketenagakerjaan dan kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan kajian penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur?
3. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh aspek tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

1. Penelitian memiliki fokus pembahasan pada seri data Provinsi Jawa Timur antara tahun 2005-2009.
2. Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel dependen, sedangkan kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tenaga kerja berperan sebagai variabel independen.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Masyarakat umum

Sumber kajian yang mampu meningkatkan pemahaman dan memperluas ilmu pengetahuan pembaca terkait topik penelitian. Serta menjadi bahan referensi ataupun studi komparatif bagi penelitian selanjutnya dengan topik

yang relevan.

## 2. Universitas

Menambah koleksi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur dan perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur dalam membahas atau memecahkan masalah yang sama.

## 3. Peneliti

Menjadi sarana implementasi atas teori yang telah dipelajari pada perkuliahan dan menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian.